

**POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: MEMBANGUN SOLIDARITAS ATAU
MEMECAH BELAH MASYARAKAT
(Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2024)**

Yohanes Mba Malo Sali¹

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana-Malang
Email: yohanzalli@gmail.com

ABSTRACT

Democratization that defends freedom becomes the basis for every individual to renew themselves, even in political matters. The individual freedoms guaranteed by the Constitution in Indonesia reflect the high popularity of this democratic system. However, this freedom increasingly clarifies the gaps between identities (religion, ethnicity, language and gender) that exist in Indonesia, especially when it comes to national political issues. The identity politics controversy is increasingly heated until a statement of the truth emerges that one interest group is better than another interest group, and this issue of interest begins to divide the nation which has always maintained differences. This article aims to see the extent of the impact of identity politics on Indonesian society by referring to the book Political Philosophy by Armada Riyanto. The methodology used in this article is a qualitative research methodology referring to library research, especially books and articles related to identity politics in Indonesia. The conclusion of this article is that identity politics in Indonesia can destroy the Indonesian state, because there are different groups who demand their freedom.

Keywords: Politics, Solidarity, Identity, Society, Phenomenon

ABSTRAK

Demokratisasi yang membela kebebasan menjadi landasan bagi setiap individu untuk memperbarui diri, bahkan dalam urusan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh Konstitusi di Indonesia mencerminkan tingginya popularitas sistem demokrasi ini. Namun kebebasan tersebut semakin memperjelas kesenjangan antar identitas (agama, suku, bahasa, dan gender) yang ada di Indonesia, terutama jika menyangkut persoalan politik nasional. Kontroversi politik identitas semakin memanas hingga muncul pernyataan kebenaran bahwa satu kelompok kepentingan lebih baik dibandingkan kelompok kepentingan lainnya, dan persoalan kepentingan ini mulai memecah belah bangsa yang selama ini selalu mempertahankan perbedaan. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak politik identitas pada masyarakat Indonesia dengan mengacu pada buku Filsafat Politik karya Armada Riyanto. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi penelitian kualitatif dengan mengacu pada penelitian kepustakaan, khususnya buku dan artikel terkait politik identitas di Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini adalah politik identitas di Indonesia dapat menghancurkan negara Indonesia, karena ada kelompok yang berbeda-beda yang menuntut kebebasannya.

Kata Kunci: Politik, Solidaritas, Identitas, Masyarakat, Fenomena

PENDAHULUAN

Saat ini, politik identitas telah menjadi fenomena dominan dalam lanskap politik global. Politik identitas mengacu pada proses dimana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti agama, etnis, gender, orientasi seksual atau latar belakang budaya. Identitas inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya persepsi politik dan orientasi ideologi (Muhtar Haboddin, 2012, 117). Dalam banyak kasus, politik identitas muncul sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas antar kelompok sejenis. Di tengah tantangan dan ketidakadilan yang dihadapi kelompok minoritas, politik identitas dapat menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan hak-haknya, mendapatkan pengakuan sosial dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, politik identitas juga dapat menjadi sumber konflik sosial dan polarisasi. yang memecah belah masyarakat. Apabila politik identitas digunakan semata-mata untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas secara keseluruhan, maka dapat menimbulkan perpecahan masyarakat menjadi faksi-faksi yang saling bertentangan. Tantangan terbesar dalam politik identitas adalah memastikan bahwa upaya untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok tidak mengorbankan solidaritas sosial yang lebih luas. Membangun masyarakat inklusif memerlukan keseimbangan yang cermat antara pengakuan identitas yang berbeda dan persatuan serta kepentingan bersama.

Dalam hal ini, penting bagi negara dan pemimpin politik untuk mengadopsi pendekatan yang efektif dalam menanggapi politik identitas. Diperlukan kebijakan yang dapat mendorong inklusi sosial, mendorong dialog antar kelompok, dan mengatasi akar penyebab konflik identitas (Muhtar Haboddin, 2012, 118). Hanya dengan cara inilah politik identitas bisa menjadi alat untuk menciptakan solidaritas yang kuat di masyarakat. bukan sebagai sarana untuk memecah belah mereka.

Di Indonesia, politik identitas lebih berkaitan dengan etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal, yang biasanya diwakili oleh elit yang menyuarakan pendapat mereka sendiri. Gerakan pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai wujud politik identitas (Muhtar Haboddin, 2012, 117). Isu keadilan dan pembangunan daerah memang sangat sentral dalam perbincangan politiknya, namun apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau memang ada niat dari elit lokal untuk menjadi pemimpin merupakan permasalahan yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan. Jadi pertanyaannya adalah: apa fungsinya? Politik identitas menciptakan solidaritas atau malah memecah belah masyarakat Indonesia yang nasionalis dan pluralistik di masa depan? Jika

berbahaya, dalam bentuk apa dan bagaimana cara mengobatinya? Melalui artikel tersebut, penulis mencoba menjelaskannya.

METODELOGI

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini antara lain metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada penelitian kepustakaan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasar pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti di mana posisi obyek yang alamiah (Najon, 2020, 68). Penulis mengumpulkan data-data mengenai politik identitas di Indonesia dalam buku-buku dan artikel-artikel yang ada berhubungan dengan masalah yang dipecahkan dalam artikel ini. Kemudian penulis hendak menyoroti efek dari politik identitas baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Setelah melihat keduanya, penulis mencoba memberi masukan berupa upaya untuk membangun kehidupan berpolitikan di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

A. POLITIK IDENTITAS

Kajian mengenai politik identitas mulai menarik perhatian para ilmuwan sosial pada tahun 1970an, dimulai dari Amerika Serikat. Saat itu, pemerintah AS mempunyai permasalahan dengan kelompok minoritas, gender, feminisme, ras, etnis, dan kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan teraniaya. Kemudian, berdasarkan kesamaan tersebut, mereka mencoba mewajibkan negara untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, ruang lingkup politik identitas meluas hingga mencakup agama, kepercayaan dan berbagai ikatan budaya, serta kepentingan-kepentingan lain yang diartikulasikan sebagai identitas diri dan kelompok (Armada, 2009, 34). Lahirnya politik identitas bermula dari beberapa faktor, seperti perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas dan keinginan untuk mengedepankan prinsip kesetaraan dalam masyarakat secara umum. Selain itu, politik identitas muncul dari kepentingan anggota suatu kelompok sosial yang merasa tertindas dan terpinggirkan oleh hegemoni *mainstream* suatu bangsa atau negara.

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh (Ardipandanto, April 2020, 47). Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik

mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional di Wina pada 1994. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Haller, 1996, ix).

B. POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Politik identitas diperlukan dalam negara demokrasi. Kemunculannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari penerapan demokrasi di suatu negara yang salah satu prinsip terpenting demokrasi adalah terwujudnya hak-hak dasar masyarakat yang dilindungi oleh negara (Muhtar Haboddin, 2012, 119). Hak-hak mendasar tersebut antara lain adalah kebebasan berpendapat, yang menjamin hak setiap orang untuk menentukan pilihan politiknya terhadap suatu isu tertentu, terutama yang berdampak pada dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Kebebasan berekspresi inilah yang menjadi landasan bagi beberapa orang yang merasa memiliki kesamaan pemikiran, ideologi dan identitas tertentu, sepakat untuk membentuk suatu identitas dengan tujuan untuk mengungkapkan kepentingan berdasarkan identitas tersebut.

Identitas politik ini menjadi wujudnya, interaksi yang terjadi antara nilai-nilai utama demokrasi dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang telah menjadi tatanan sosial masyarakat (Muhtar Haboddin, 2012, 120). Persinggungan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai lokal yang sudah ada dalam masyarakat serta semakin besarnya kesadaran seluruh masyarakat dalam berdemokrasi, yang harus menjunjung tinggi hak-hak dasarnya, menjadikan politik identitas dengan cepat bersemi dan berkembang serta menjadi bagian dari demokrasi.

Namun lahirnya politik identitas telah mendapat banyak perhatian dan wawasan dari banyak ilmuwan sosial. Hal ini dikarenakan para ilmuwan sosial khawatir bahwa politik identitas merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi demokrasi karena dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah dan terpolarisasi berdasarkan identitas masing-masing, sehingga secara langsung mengancam nasionalisme dan pluralisme negara (Armada, 2009, 34). Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa politik identitas tidak mengancam nasionalisme dan pluralisme negara, jika para ilmuwan politik menganggap konsep tersebut sebagai sarana agar politik identitas tidak menjadi penghambat demokrasi itu sendiri.

Riyanto dalam karyanya buku Filsafat Politik mengacu pada politik identitas, di garda depan politik (Riyanto, 2011, 123). Namun politik identitas adalah titik awal pengelolaan hidup berdampingan. Jika melihat terbentuknya negara ini, hal pertama yang dianggap sebagai persoalan status adalah pertanyaan “siapakah manusia bangsa Indonesia”. Para pendiri bangsa kita berhasil mengatasi banyak rintangan awal dalam menemukan identitas nasionalnya. Riyanto juga mengungkapkan dalam bukunya bahwa “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial” berarti identitas tidak dimaknai secara personal, melainkan antar manusia; bukan antar kelompok atau kelompok, melainkan secara keseluruhan (Riyanto, 2011, 124). Dengan demikian, “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial” juga berarti perasaan menjadi sebuah bangsa secara keseluruhan. Identitas juga merupakan realitas yang mencakup prinsip persaudaraan, ketetanggaan, solidaritas, dan dialog.

Di Indonesia sendiri, banyak isu terkait politik identitas yang mengemuka. Di sini, politik identitas lebih berkaitan dengan etnis, agama, ideologi, dan kepentingan lokal, yang biasanya diwakili oleh elit yang diartikulasikan sendiri. Faktanya, politik identitas sebagian besar menjadi dasar gerakan untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan yang sejalan dengan kepentingan identitasnya (Muhtar Haboddin, 2012, 121). Kita melihat bagaimana wujud politik identitas keagamaan diwakilkan oleh kelompok seperti Hizbuttahrir Indonesia yang dengan konsep Daulah Khilafiah berupaya menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Atau Front Pembela Islam yang diartikan sebagai bentuk radikalisme Islam akan melakukan segala cara, bahkan kekerasan, untuk menegakkan hukum Islam. Banyak pihak yang menganggap kebijakan identitas berbasis agama ini merupakan ancaman terhadap pluralitas dan integrasi bangsa Indonesia. Selain kebijakan identitas berbasis agama, asal usul etnis kerap menjadi dasar kebijakan identitas di Indonesia (Ardipandanto, April 2020, 48).

Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis dan budaya yang masing-masing memiliki nilai, sudut pandang, identifikasi, dan kearifan tersendiri. Tentunya setiap suku juga mempunyai cara berbeda dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia untuk melestarikan suku dan budayanya. Ada yang mengutarakan identitas etnisnya namun tetap berusaha mengikuti jalur nasionalisme Indonesia, ada pula yang mengungkapkan ekspresi ekstrim untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dan ingin melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Ardipandanto, April

2020, 48). Ungkapan seperti “Presiden Indonesia harus orang Jawa”, “Sudah Saatnya Pimpinan Sunda Menjadi Presiden” merupakan contoh ungkapan terkait politik identitas etnik, namun tetap menjadi bagian dari keutuhan bangsa. Hal ini tentunya menjadikan kajian politik identitas etnik menjadi sangat penting untuk menghindari ekspresi politik identitas yang berlebihan yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, namun menyalurkannya sebagai ekspresi politik identitas yang dapat membantu Indonesia dalam perjalanannya menuju ke arah yang lebih baik. Indonesia. demokrasi yang mampu mengadaptasi kearifan lokal di Indonesia dan mempertimbangkan segala manfaatnya (Armada, 2009, 34).

a) Tantangan Politik Identitas Di Indonesia

Politik identitas, jika fokus pada kesetaraan, memicu konflik yang timbul dari adanya kelompok superior dan inferior, atau yang lazim dipahami sebagai kelompok mayoritas dan minoritas (Hutapea dkk., Juni 2023, 430). Di sisi lain, ada hal positif dalam politik identitas, jika tujuannya untuk melestarikan budaya agar budaya tersebut tidak hilang, namun dengan adanya perbedaan di negara yang multikultural maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, harus diutamakan, selain itu agama dan suku juga memegang peranan (Widyawati, 2021). Di sini tugas negara adalah mencegah adanya kelompok-kelompok, jika terjadi saling diskriminasi, dimana kelompok itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan harus dikendalikan untuk menjaga keharmonisan bangsa dan negara. Konteks kemerdekaan tidak “berlebihan” karena merupakan amanah para pendiri yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dinamika berikut mulai menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka ingin menunjukkan jati dirinya. Seiring dengan munculnya dan tumbuhnya banyak pihak, serta organisasi keagamaan baru yang memungkinkan terjadinya konflik identitas, maka “keutamaan putra daerah” sering disebut-sebut (Arwiyah dan Machffiroh, 2014) dan yang akan diusung masing-masing calon untuk maju pada pemilu 2024.

Potensi peningkatan konflik, Politik identitas dalam pemilu 2024 yang sudah berlalu mempunyai tantangan yakni partai politik sebagai elemen kunci dalam proses pencalonan tentunya harus bisa berperan penting dalam proses pembentukan kekuatan. Pertama, ketegangan politik dalam negeri dapat menyebabkan konflik, terutama jika terjadi antara pemerintah dan oposisinya, atau antara kelompok etnis atau agama tertentu. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, pemilihan yang kontroversial, atau ketidakadilan dalam sistem politik dapat menyebabkan ketegangan yang dapat mengarah pada konflik. Kedua, perubahan ekonomi yang tidak merata

dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, dan ketidaksetaraan pendapatan dapat menyebabkan protes dan konflik sosial. Ketiga, konflik dapat muncul antara negara atau kelompok etnis yang bersaing untuk mengakses sumber daya tertentu, seperti air, energi, atau lahan pertanian. Terakhir, konflik dapat diperburuk oleh ketegangan geopolitik antara negara-negara besar atau regional. Ketegangan ini dapat terkait dengan ideologi, wilayah, atau kepentingan strategis. Konflik kekuatan, konflik di perbatasan, atau intervensi asing dalam urusan dalam negeri suatu negara dapat terjadi. Tanpa pembentukan kekuatan partai yang baik, proses pencalonan tentu akan sulit bagi partai itu sendiri. Dengan demikian, *power building* merupakan upaya yang dilatarbelakangi untuk membentuk kesatuan kepribadian dan kekuasaan untuk melatih orang lain secara intensif guna mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan.

Tentu saja tugas calon untuk bekerja dalam organisasi dan mensejahterakan organisasi merupakan kekuatan hidup di masa depan (Harahap, 2017). Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pendirian partai politik, yaitu pertama, partai politik masih kurang dipilih oleh para pencari bakat untuk melakukan kiprah politik sebagai lembaga demokrasi. Kedua, masih kurangnya dana yang dimiliki partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda, karena para pemilih muda dan pimpinan partai mengambil materi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hutapea et al., Juni 2023, 431). Beberapa rekomendasi terkait partai politik, seperti perlunya pengaturan keuangan partai politik yang cukup transparan dan berkeadilan, diharapkan ada aturan untuk pencalonan calon partai, agar lebih dari satu. Kandidat pemilih yang cerdas untuk menyelenggarakan pelatihan pra-kandidat di partai politik ke depannya, mendanai lembaga yang terakreditasi, terakhir mempublikasikan calon daerah terkait kasus pidana agar pemilih mengetahui calon yang menghadapi permasalahan hukum (Utara, 2018).

Polarisasi diskriminasi, Polisasi diskriminasi adalah istilah yang mengacu pada pembagian masyarakat menjadi kelompok yang saling bertentangan secara ideologis atau sosial, yang seringkali menyebabkan lebih banyak ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Ini menciptakan pembagian di antara berbagai kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Polarisasi ini meningkatkan diskriminasi, meningkatkan ketegangan, permusuhan, dan kebencian antara kelompok tersebut. Ini tidak hanya merugikan korban diskriminasi, tetapi juga merusak kohesi sosial dan menghalangi kemajuan menuju masyarakat yang lebih adil dan

inklusif. Pemilu juga merupakan sebuah proses yang mensyaratkan pentingnya jumlah suara. Kebutuhan akan jumlah suara untuk memenangkan proses pemilu sangat mempengaruhi strategi kemenangan. Salah satu cara yang sangat mudah untuk mendapatkan suara massal adalah dengan menggunakan politik identitas. Cara sederhana ini tentu sangat menguntungkan partai politik yang lemah dalam pembentukan kader dan pengangkatan (Hutapea et al., Juni 2023, 431). Minimnya figur yang mumpuni tentu berdampak pada kecenderungan partai politik yang menggunakan politik identitas. Identitas berbasis SARA tentunya menjadi bahan baku efektifnya penggunaan politik identitas untuk menggerakkan massa agar memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilu.

Meningkatkan kesenjangan. Melebarnya kesenjangan sosial, ekonomi, atau politik disebut sebagai peningkatan kesenjangan. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kebijakan publik yang tidak adil, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang. Ketidaksetaraan yang meningkat dapat menimbulkan frustrasi, perasaan tidak adil, dan ketegangan sosial. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi, akses yang adil ke sumber daya, dan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan inklusi sosial. Politik identitas mulai dari tahap kampanye, di sini diharapkan fokus dan arah, membentuk tim yang jujur memantau pergerakan calon dan calon, menghindari pelanggaran dalam kampanye, apalagi jika menunjukkan sikap terkait identitas SARA dan mengecualikan kelompok lain yang tidak ada kaitannya dengan calon peserta pemilu atau pilkada ke depannya (Hutapea et al., Juni 2023, 431).

b) Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2024 Di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi setiap lima tahun mengadakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum. Tujuan sebuah pemilihan umum adalah untuk memungkinkan warga negara sebuah negara demokratis untuk secara bebas menentukan siapa yang akan mewakili dan mengatur tata kelola pemerintahan dengan harapan bahwa dapat mensejahterakan masyarakatnya. Negara Indonesia berada pada tahun demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah berlalu. Pemilihan Presiden tahun 2024 telah menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat Indonesia. Karena adanya berbagai kontroversi di berbagai pihak. Menjelang pilpres negara kita sedang tidak baik-baik saja. Untu itu

pada bagian ini penulis mencoba memberikan upaya mengatasi politik identitas pasca pemilu 2024, mengurangi politik identitas yang destruktif terkait pemilu 2024 sebagai berikut;

Pertama, mengedukasi, Mempelajari politik identitas melibatkan pemahaman tentang bagaimana pandangan politik seseorang dipengaruhi oleh identitas seperti suku, agama, gender, atau orientasi seksual. Ini juga melibatkan peningkatan kesadaran tentang kompleksitas hubungan antara identitas dan kebijakan politik serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan pendidikan politik identitas adalah untuk menanamkan rasa terima kasih, menghargai keberagaman, dan kemampuan untuk menerima perspektif yang berbeda. Memperkuat inklusi sosial, mengurangi polarisasi, dan membangun masyarakat yang lebih bersatu dan adil adalah bagian penting dari upaya ini (Samosir, Mei 2022). Perlakuan terhadap kebijakan identitas yang ada, penulis juga menyarankan pentingnya prinsip martabat manusia dalam keinginan mayoritas. Jika mengacu pada politik identitas yang memisahkan kelompok mayoritas dan minoritas, maka dapat dipahami bahwa ukuran kekuasaan yang diterapkan oleh kelompok mayoritas bukanlah ukuran yang membenarkan kesalahan kelompok mayoritas, karena bersifat sementara. Oleh karena itu, kemauan mayoritas harus ditentukan melalui kesepakatan bersama berupa asas atau asas yang diterima bersama (Pancasila) untuk menunjukkan nilai demokrasi. Perjanjian tersebut memuat tugas terpenting untuk memperkuat keamanan nasional, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua orang, terutama dalam pemilu (Prasetyo dan Muhammad, 2020).

Kedua, membangun dialog. Membangun dialog berarti memberi orang ruang untuk mendengarkan, berbicara, dan memahami perspektif yang berbeda dengan hormat. Ini mencakup kemampuan untuk melawan keegoisan dan prasangka pribadi serta mendorong sikap yang berempati dan memahami. Membangun dialog merupakan langkah penting dalam memecahkan konflik, memperkuat kohesi sosial, dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Dialog yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang berbeda untuk saling belajar, mencapai kesepakatan, dan menemukan cara yang adil dan berkelanjutan untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Kondisi ini juga penting karena pemilihan parlemen dilakukan secara langsung dan oleh masyarakat tanpa perwakilan. Hal ini memaksa pendidikan politik menjadi penting bagi setiap orang. Jika dilihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada, maka penyebab terjadinya perbedaan makna politik disebabkan oleh beberapa faktor, karena di satu sisi masih ada masyarakat yang merasa belum merasakan kehadiran partai politik yang memberikan manfaat bagi

dirinya. Pembangunan dan kesejahteraan hingga saat ini masyarakat belum memahami peran partai politik di tanah air. Oleh karena itu, perlu adanya struktur dan kader partai di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Kehadiran partai politik tentu bisa dirasakan oleh masyarakat jika partai politik menyelesaikan persoalan nyatanya sedemikian rupa sehingga masyarakat terbuka terhadap kesadaran politiknya. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat juga memahami bahwa semua partai politik mengetahui dan memperoleh makna baru dalam kaitannya dengan partai politik yang kompeten (Daryanto, 2019).

Ketiga, penguatan institusi demokratis. Lembaga-lembaga yang mendukung sistem demokrasi, seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, harus diperkuat untuk memperkuat institusi demokratis. Memperkuat institusi demokratis juga berarti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Memperkuat institusi demokratis juga berarti memperkuat aturan hukum, menjaga lembaga demokratis independen dari intervensi politik, dan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Langkah-langkah ini membantu stabilitas politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan representasi yang adil dan inklusif dalam pengadilan.

Pendidikan politik diharapkan mampu mengurangi dampak destruktif politik identitas dalam praktik pemilu. Hal ini didukung oleh nilai-nilai kognitif dan afektif yang digalakkan dalam masyarakat, yang memiliki aspek yang mengurangi dampak politik identitas yang destruktif (Alfaqi, Agustus 2015). Nilai-nilai politik pendidikan yang dapat digalakkan dalam masyarakat terkait dengan politik identitas destruktif adalah toleransi dan pluralisme. Terkait pendidikan politik, penulis memahami bahwa kesadaran politik warga negara harus ditekankan. Situasi yang diciptakan oleh pendidikan politik merupakan kesadaran kritis akan keberadaan warga negara Indonesia yang berdaya saing dan kuat. Pendidikan politik dibedakan menjadi dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan politik formal dan pendidikan politik informal (Jurdi, 2020). Pendidikan politik formal dimulai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menyadarkan masyarakat bahwa toleransi diperlukan dan bahwa situasi pluralistik di Indonesia tidak dapat dihindari tetapi dihadapi dengan pendidikan politik yang tepat, sedangkan pendidikan politik informal dengan transparansi tugas dan tugas yang harus dilakukan tidak dapat dihindari. (Alfaqi, Agustus 2015).

Keempat, orang muda pengawas demokrasi. Pengawas demokrasi muda adalah agen perubahan yang penting untuk menjaga integritas proses politik. Mereka mengawasi pemilihan umum, mendorong pemilih muda untuk berpartisipasi aktif, dan melawan kecurangan dan kecurangan. Mereka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik dengan menggunakan teknologi dan jejaring sosial. Pengawas demokrasi muda mendorong perubahan dalam tata kelola demokratis dengan menekankan keadilan, inklusi, dan kebebasan berpendapat. Mereka membawa semangat dan perspektif baru untuk memperkuat fondasi demokrasi di dunia yang berkembang cepat. Peserta dalam pendidikan politik tentunya menjadi penjaga kemajuan demokrasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pendidikan politik terdapat sinergi antar komponen bangsa, namun secara khusus menjadi tanggung jawab warga berbagai pihak, misalnya partai politik, KPU masyarakat dan media massa. Oleh karena itu, demi perdamaian di Indonesia, perlu adanya kerja sama antara lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan media untuk saling mendukung agar pemilu mendatang berjalan dengan lancar dan lancar (Samosir, Mei 2022).

C. POLITIK IDENTITAS: MEMBANGUN SOLIDARITAS ATAU MEMECAH BELAH MASYARAKAT

Politik identitas telah menjadi salah satu isu yang sangat kontroversial dan relevan dalam dinamika sosial dan politik kontemporer. Dalam konteks politik, identitas merujuk pada bagaimana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri berdasarkan karakteristik tertentu seperti agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosio-ekonomi (Lestari, Desember 2018, 26). Dalam beberapa dekade terakhir, politik identitas telah menjadi kekuatan yang mendorong perubahan politik, baik secara positif maupun negatif, di berbagai belahan dunia. Salah satu argumen yang sering muncul adalah apakah politik identitas membantu membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda atau malah memecah belah masyarakat. Di satu sisi, pendukung politik identitas berpendapat bahwa mengakui dan memperjuangkan hak-hak kelompok-kelompok minoritas atau terpinggirkan adalah langkah penting menuju inklusi sosial yang lebih baik (Lestari, Desember 2018, 26). Mereka berargumen bahwa dengan memberikan perhatian khusus pada identitas-identitas ini, masyarakat dapat membangun solidaritas yang lebih kuat di antara berbagai kelompok. Namun, di sisi lain, kritik terhadap politik identitas menyatakan bahwa fokus yang terlalu besar pada identitas tertentu dapat memecah belah masyarakat. Hal ini terutama terjadi ketika politik identitas digunakan sebagai alat untuk memperkuat perpecahan

antara kelompok-kelompok, yang sering dimanipulasi oleh politisi atau kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan politik mereka (Al-Farisi, Februari 2018).

Penting untuk diakui bahwa politik identitas tidak selalu berjalan satu arah. Terdapat situasi di mana politik identitas dapat membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau minoritas. Namun, ada juga situasi di mana politik identitas justru memperdalam kesenjangan dan memecah belah masyarakat (Al-Farisi, Februari 2018). Konteks sosial, politik, dan budaya setempat memainkan peran kunci dalam menentukan dampak politik identitas. Salah satu contoh positif politik identitas adalah gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat pada abad ke-20 (Lestari, Desember 2018, 26). Gerakan ini membawa perubahan signifikan dalam hal hak-hak dan perlindungan bagi warga Amerika Serikat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti warga kulit hitam. Melalui mobilisasi politik identitas, gerakan ini berhasil memperjuangkan hak-hak sipil dan membangun solidaritas di antara berbagai kelompok minoritas untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, ada juga contoh negatif di mana politik identitas memperdalam perpecahan. Misalnya, di beberapa negara yang dilanda konflik etnis atau agama, politik identitas sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkuat kontrol politik mereka dengan menghasut ketegangan antarkelompok (Saputro, Desember 2018). Dalam kasus-kasus seperti ini, politik identitas tidak hanya gagal membangun solidaritas, tetapi juga memperdalam pertentangan dan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara politik identitas yang memperjuangkan inklusi sosial dan keadilan dengan politik identitas yang dimanipulasi untuk kepentingan politik sempit.

Memahami bahwa identitas merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan masyarakat adalah langkah awal yang penting (Saputro, Desember 2018). Namun, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa politik identitas digunakan sebagai alat untuk membangun solidaritas dan inklusi, bukan untuk memecah belah masyarakat. Ini membutuhkan pendekatan yang holistik, di mana politik identitas dipandang sebagai bagian dari kerangka kerja yang lebih luas untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Maariif, (2012). Di akhir, politik identitas bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya atau diterima tanpa kritis. Sebagai gantinya, kita perlu mengevaluasi peran politik identitas dalam konteks spesifiknya dan memastikan bahwa penggunaannya sejalan dengan nilai-nilai inklusi, keadilan, dan solidaritas.

Hanya dengan pendekatan yang hati-hati dan kritis, politik identitas dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif bagi semua warganya

KESIMPULAN

Pluralisme bangsa Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi sumber kekuatan politik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat namun tetap harus ramah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, penguatan ideologi negara “Pancasila” menjadi keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh negara. Hanya dan mungkin satu-satunya jalan melalui konsepsi “Politik Kebhinnekaan” yang akan menjabarkan secara praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik negara dan politik kebangsaan sebagai antitesis dari Politik Identitas yang lebih rentan untuk disalah gunakan oleh elite-elite politik yang tidak memahami jiwa dan semangat nasionalisme kita. Agama, merupakan identitas pertama dan utama yang paling rentan ‘rawan’ untuk disalahgunaan dalam praktik Politik Identitas di republik yang kita cintai ini. Simbolisme agama dalam politik negara dan politik kebangsaan merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang belum tuntas dirumuskan jawabannya, sejak merumuskan dasar negara di awal kemerdekaan pertarungan ‘benturan’ ideologis antara agama dan politik tidak terelakkan telah mewarnai proses kesepakatan politik untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Akhirnya, untuk memenangi pertarungan politik ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pemikiran dan langkah-langkah yang jauh lebih strategis dari negara untuk mengelola keragaman bangsa, pluralisme, dan menata kembali hubungan dinamis antara agama dan Pancasila melalui penguatan ideologi negara dan menggelorakan kembali jiwa serta semangat nasionalisme secara lebih kreatif dan efektif. Oleh karena itu, pentingnya peran negara. Bukan hanya sekadar menghadirkan negara, tapi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi secara aktif dalam menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyalahgunaan praktik Politik Identitas yang cenderung dibiarkan, merupakan bukti kalau negara tidak berdaya bahkan hampir “kalah” dalam menjalankan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Heller and Sonja Punscher Riekmann, 1996 *Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature*, Brookfield: Avebury.
- Agus Saputro, (Desember 2018), *Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019*, Jurnal Asketik Vol. 2 No. 2
- Ahmad Syafii Maariif, (2012), *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Demokrasi Project.
- Arwiyah, M. Y., & Machffiroh, R. (2014). *Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Aryojati Ardipandanto, Mei 2020 *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*, Politica Vol. 11 No. 1
- Bahtiar. (12 April 2023). *Power point Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas Destruktif*. Jakarta: Kemendagri.
- Daryanto, T. (2019). *Partai Advokasi (Menghapus Dominasi Uang dalam Politik*. Depok: Penerbit LP3ES, anggota IKAPI.
- Denny Najoran, 2020, "Memahami Hubungan Religiusitas dan Spritualitas Di Era Milenial." *Jurnal Education Christi* No. 1.
- Harahap, I. H. (2017). *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional*. Universitas Bakrie, Jakarta, 1-2.
- Hutapea, dkk, Juni 2023, "Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1.
- Jurdi, F. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: KENCANA.
- Leli Salman Al-Farisi, (Februari 2018) *Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila*, JURNAL ASPIRASI Vol. No. 2
- Mifdal Zusron Alfaqi, (Agustus 2015), *Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2.
- Muhtar Haboddin, 2012, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, Jurnal studi pemerintahan, Vol. 3 No. 1.

Yohanes Mba Malo Sali, Politik Identitas di Indonesia: Membangun Solidaritas Atau Memecah Belah Masyarakat, Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL), Vol 3 Issue 2 No 2, April 30, 2024

- Osbin Samosir dan Indah Novitasari, (Mei 2022) Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024, Jurnal ilmu hukum humaniora dan politik, Volume 2, Issue 3,
- Prasetyo, T., & Muhammad. (2020). Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Riyanto, Armada. (2009), Politik, Sejarah, Identitas, Postmodernitas, Malang:Widya Sasana Publication.
- Riyanto, Armada. 2011, Berfilsafat Politik, Jakarta: Kanisius.
- Utara, T. U. (2018). Laporan Kajian Evaluasi Pilkada dan Focus Group Discussion (FGD) Series. Medan, Sumatera Utara: Bagian Kerjasama Antar Lembaga Biro Perencanaan dan Data KPU RI.
- Widyawati. (2021). menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2021, 68.
- Yeni Sri Lestari, Desember 2018, Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama, Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1.